

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Tahun Anggaran 2021 – 2026

KECAMATAN WATUMALANG
KABUPATEN WONOSOBO



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN WATUMALANG
TAHUN 2021

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Tahun Anggaran 2021 – 2026

KECAMATAN WATUMALANG
KABUPATEN WONOSOBO

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN WATUMALANG
TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Watumalang Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen Perencanaan Lima Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Wonosobo. RPJMD Kabupaten Wonosobo merupakan tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengungkapkan hal sebagai berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan Watumalang 2021-2026 yang disusun memuat Visi, Misi, Kebijakan dan Program Aksi serta prioritas pembangunan Kecamatan Watumalang sebagai perangkat operasional pencapaian RPJMD Kabupaten Wonosobo 2021-2026. Dengan demikian, RPJMD 2021-2026 adalah pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Pemerintahan Desa, masyarakat, dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rencana Strategis Kecamatan Watumalang Tahun 2021-2026, disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Bupati Wonosobo yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kecamatan Watumalang, serta menjawab tiga pertanyaan dasar yaitu kemana Kecamatan Watumalang akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan menetapkan sasaran-sasaran pembangunan dalam menentukan tujuan yang akan dicapai.

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan saat ini terus mengalami transformasi yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, tidak hanya dari sisi penyerapan anggaran dan program kegiatan yang dilakukan tetapi lebih kepada efisiensi anggaran, efektifitas kebijakan maupun dalam pelayanan publik.

Kecamatan sebagai simpul pelayanan masyarakat harus mampu merespon dinamika tersebut, sehingga mampu mewujudkan kinerja pemerintah menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pelayanan prima.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Watumalang.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra SKPD

Penyusunan Renstra Kecamatan Watumalang tahun 2016-2021 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kecamatan;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3).

1.3. Maksud dan Tujuan dari Penyusunan Renstra

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Watumalang ini adalah :

1. Menjabarkan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Strategis Kecamatan sehingga program dan kegiatan dari Kecamatan sinkron dengan program pembangunan Kabupaten.
2. Menjadi acuan resmi bagi penyusunan rencana kerja Kecamatan Watumalang selama kurun waktu lima tahun ke depan sehingga memberikan kejelasan bagi arah pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan target atau sasaran yang akan dicapai.
3. Sebagai tolok ukur untuk menilai dan melakukan evaluasi kinerja tahunan yang diwujudkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra SKPD
- 1.3. Maksud dan Tujuan dari Penyusunan Renstra
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Watumalang
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Watumalang
 - 2.2.1. Kepegawaian
 - 2.2.2. Aset Kantor Kecamatan Watumalang
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Watumalang

BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Watumalang

BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB. VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB. VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Watumalang merupakan salah satu dari 15 kecamatan di Kabupaten Wonosobo terletak pada ketinggian 913 meter di atas permukaan laut. Adapun jarak dari Ibu Kota Kabupaten berjarak 13 km bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam menggunakan angkutan umum.

Secara umum kondisi geografi Wonosobo merupakan daerah pegunungan yang banyak terdapat perbukitan, begitu juga halnya Watumalang. Kita akan banyak menjumpai lembah dan tebing yang curam. Watumalang mempunyai tanah jenis regosol dan andosol. Dengan kondisi seperti ini sering terjadi fenomena alam seperti tanah longsor di saat musim hujan.

Luas Kecamatan Watumalang adalah 6.822,912 hektar atau 6,93 persen dari luas wilayah Kabupaten Wonosobo. Rata-rata kemiringan tanah di Kecamatan Watumalang adalah 10-40 persen. Kecamatan Watumalang merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 650-1.546 meter dari permukaan laut (dpl). Kandungan PH tanah sebesar 5-6 dan didominasi jenis tanah regosol dan andosol. Pada umumnya jenis tanah di Kecamatan Watumalang sangat subur, sehingga berpotensi untuk ditanami berbagai jenis tanaman pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Desa Krinjing dengan luas wilayah sebesar 808,549 hektar merupakan desa terluas di Kecamatan Watumalang. Adapun desa dengan luas wilayah terkecil adalah Desa Bumiroso dengan luas wilayah sebesar 97,829 hektar.

Kecamatan Watumalang beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan 3.007 mm pada tahun 2018 dengan jumlah hari hujan sebanyak 214 hari. Hari hujan terbanyak ada pada bulan Januari 2019 sebanyak 29 hari hujan. Curah hujan tertinggi pada bulan Desember sebanyak 608 mm. Terdapat hari hujan di setiap bulan sepanjang tahun 2019 terjadi pada bulan Agustus.

Kecamatan Watumalang terdiri dari 15 desa dan 1 kelurahan, dengan jumlah rukun tetangga sebanyak 472 RT, rukun warga sebanyak 133 RW dan 63 Dusun. Seluruh desa dan kelurahan termasuk klasifikasi swasembada. Desa dengan jumlah RT terbanyak yaitu Desa Binangun sebanyak 68 RT, sedangkan desa dengan jumlah RT paling sedikit yaitu Desa Wonosroyo dan Desa Watumalang yaitu masing-masing sebanyak 13 RT.

Sarana Pemerintahan yaitu balai Desa/ Kelurahan dan Kantor Desa/ Kelurahan sudah tersedia di semua desa di Kecamatan Watumalang. Luas tanah bengkok pamong atau perangkat desa di Kecamatan Watumalang tahun 2019 adalah 215,075 hektar, di mana penggunaan dan jenis tanah terluas berupa tanah kering dengan luas 107,967 hektar. Desa yang memiliki tanah bengkok terluas adalah Desa Krinjing dengan luas 38,452 hektar dan desa dengan tanah bengkok terkecil adalah Desa Pasuruhan dengan luas tanah bengkok 0,955 hektar.

Masyarakat hidup damai aman tentram sudah terwujud di Watumalang berkat kerjasama yang baik antara pemerintah kecamatan,

aparatus keamanan, pemerintah desa/kelurahan dari kepala desa/kelurahan sampai ketua RT dan seluruh lapisan masyarakat Watumalang.

Berdasarkan data proyeksi penduduk BPS Kabupaten Wonosobo, penduduk Kecamatan Watumalang pada tengah tahun 2019 sebanyak 49.528 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 25.271 jiwa dan perempuan 24.257 jiwa. Angka rasio jenis kelamin (perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan) di Kecamatan Watumalang tahun 2019 adalah 104. Jumlah ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk wanita terdapat 104 penduduk laki-laki di Kecamatan Watumalang.

Jumlah penduduk terbesar ada di Desa Binangun sebanyak 6.583 jiwa dengan 3.309 laki-laki dan 3.274 perempuan, sedangkan wilayah dengan jumlah paling kecil adalah Desa Mutisari dengan jumlah penduduk sebanyak 1.315 jiwa.

Pada tahun 2019, kepadatan penduduk di Kecamatan Watumalang adalah 726 jiwa per km². Desa Bumiroso merupakan yang terpadat yaitu 3.028 jiwa per km² sedangkan yang paling rendah terdapat di Desa Mutisari yaitu 244 jiwa per km².

Rasio ketergantungan (dependency ratio) sebesar 50,99 yang artinya beban penduduk yang ditanggung oleh usia produktif masih lebih rendah dari jumlah usia yang belum produktif dan sudah tidak produktif lagi. Angka rasio ketergantungan ini turun dari tahun sebelumnya sebesar 51,16.

Kecamatan Watumalang memiliki fasilitas pendidikan antara lain SMA, SMK, SMP, MTs, SD, MI dan TK. Selain fasilitas pendidikan tersebut terdapat beberapa playgroup atau PAUD. Playgroup bertujuan untuk membentuk anak yang berkualitas, karena anak akan distimulasi perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama), bahasa dan komunikasi. Terdapat sebanyak 1 SMA, 1 SMK, 7 SMP, 4 MTs, 32 SD, 2 MI dan 20 TK.

Angka rasio murid terhadap guru, yaitu jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru atau pengajar, pada tahun ajaran 2019/2020 untuk tingkat SD berada pada angka 22. Sebanyak 4.915 murid SD diampu oleh 219 guru. Rasio murid guru di tingkat MI sebesar 17. Rasio murid guru di tingkat pendidikan menengah, untuk SMP sebesar 17 dan MTs sebesar 7, sedangkan di tingkat SMA dan SMK, rasio murid guru masing-masing sebesar 12 dan 5.

Kesehatan dan Keluarga

Banyaknya pasangan usia subur (PUS) di Kecamatan Watumalang pada tahun 2017 sebesar 10.639 PUS, turun sebesar 10,44 persen jika dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebanyak 11.879 PUS. Sebanyak 8.348 PUS ikut KB, sedangkan sebanyak 2.291 PUS tidak ikut ber-KB.

Jumlah PUS peserta KB menurun sebanyak 1.436 PUS dari tahun sebelumnya dan yang tidak ikut KB meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 196 PUS. Secara persentase, PUS yang ikut KB menurun dari tahun 2016 yaitu dari 1,48 persen menjadi 14,68 persen pada tahun 2019.

Akseptor KB yang paling banyak diminati di Kecamatan Watumalang pada tahun 2019 masih sama dengan tahun 2018 yaitu

suntik. Sejumlah 5.241 atau 62,78% akseptor memilih jenis suntik. Alat kontrasepsi yang paling sedikit peminatnya adalah cara tradisional yaitu sebanyak 10 akseptor atau 0,12%. Desa dengan tingkat partisipasi tertinggi adalah Desa Watumalang sebesar 89,35% yang mana tahun sebelumnya predikat desa dengan tingkat partisipasi tertinggi adalah Desa Gumawang Kidul sebesar 87,09% dan yang paling rendah adalah Desa Kuripan yaitu sebesar 64,46 %.

Agama

Mayoritas penduduk Kecamatan Watumalang beragama Islam yaitu sebesar 99,7%. Non muslim sebanyak 0,30% terdiri dari Kristen Protestan sebanyak 0,26% dan Kristen Katolik sebanyak 0,04%.

Sarana tempat ibadah cukup memadai. Berdasarkan data dari KUA Kecamatan Watumalang, jumlah masjid sebanyak 106 buah, mushola 175 buah dan gereja 2 buah.

Tanaman Pangan

Sebagian besar penduduk di Kecamatan Watumalang bermata pencaharian sebagai petani, baik sebagai petani sendiri, penggarap, maupun sebagai buruh tani. Sebagian besar kegiatan pertanian di Kecamatan Watumalang adalah bertanam padi. Produksi padi sawah pada tahun 2019 masih sama tidak mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, produksi padi sawah mencapai 4.720 ton sedangkan tahun sebelumnya adalah 4.720 ton. Produksi padi sawah tahun 2019 masih sama disebabkan luas panen yang masih sama dibanding pada tahun 2018, yaitu 955 hektar. Produktivitas padi sawah pada tahun 2019 masih 4,94 ton/hektar.

Di wilayah Kecamatan Watumalang juga terdapat pertanian tanaman pangan yang lain seperti jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Keempat komoditas tersebut pada tahun 2019 masih tetap jumlah produksi jika dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Tanaman hortikultura yang ada di Kecamatan Watumalang cukup banyak Pada tahun 2019 kubis, sawi/ petsai, bawang daun, cabai rawit mengalami kenaikan sedangkan tomat dan buncis mengalami penurunan produksi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perekonomian

Jumlah pasar di Kecamatan Watumalang tidak mengalami perubahan jumlah dibanding tahun sebelumnya. Jumlah warung kelontong tahun 2019 sebanyak 586 warung dan terdapat di seluruh desa.

Keberadaan lembaga jasa keuangan di Kecamatan Watumalang pada tahun 2019 tercatat jumlah Koperasi sebanyak 4 koperasi, 3 bank dan 4 BMT.

Mayoritas industri di Kecamatan Watumalang masih masuk dalam kategori industri kecil dan industri rumah tangga (mikro) karena jumlah pekerja dalam industri yang ada masih di bawah 20 pekerja untuk masing-masing usaha. Industri di Kecamatan Watumalang terbanyak adalah industri rumah tangga. Dari 57 industri yang ada, 35 industri merupakan industri rumah tangga dan 22 industri kecil.

Transportasi dan Komunikasi

Panjang jalan kabupaten di Kecamatan Watumalang tahun 2019 adalah 79,00 km. Kecamatan Watumalang memiliki 30 buah jembatan dengan panjang total 186 meter. Secara umum, kondisi jembatan pada tahun 2019 dalam kondisi baik. Apabila diproporsikan keadaan jembatan tahun 2019 adalah 76,67 persen dalam kondisi baik, 16,67 persen dalam kondisi sedang, dan 6,66 persen dalam kondisi rusak.

Transportasi sangat dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya mobilitas penduduk maupun barang. Sehingga diharapkan dengan adanya ketersediaan sistem transportasi ini dapat menunjang berbagai aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Pada umumnya daerah-daerah yang memiliki jaringan angkutan darat sebagai sarana yang menghubungkan daerah tersebut dengan daerah lain, akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan daerah-daerah yang terisolir.

Transportasi merupakan sarana sangat penting dalam hal tumbuh kembang kemajuan suatu daerah, transportasi umum dari Watumalang ke Ibukota Kabupaten sudah cukup memadai yaitu mobil mini bus dengan trayek jurusan Wonosobo-Watumalang, namun tidak setiap desa di Watumalang dilalui angkutan tersebut.

Adapun sarana transportasi yang digunakan sebagian masyarakat yang bertempat tinggal pada daerah yang tidak dilalui angkutan umum menggunakan angkutan roda dua/ ojek yang tidak setiap saat ada.

Di wilayah Kecamatan Watumalang guna memperlancar arus keluar masuk barang hasil bumi menuju pasar masih terdapat kendala karena jalan-jalan antar desa ke ibu kota kecamatan dan pasar induk sebagian masih sulit karena rusak parah.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Watumalang saat ini bisa dikatakan cukup. Sarana komunikasi dan informasi seperti radio, televisi dan telepon genggam sudah bisa diakses dengan baik di Watumalang. Pembangunan beberapa tower dari perusahaan yang bergerak di bidang telepon seluler menjadikan pengguna seluler dapat dengan mudah di bandingkan beberapa tahun lalu sebelum didirikan tower. Perusahaan telekomunikasi telah membangun 8 buah tower di Kecamatan Watumalang

Keamanan dan Ketertiban Umum

Upaya pengendalian keamanan ketertiban dilakukan dengan melibatkan seluruh aspek dan elemen masyarakat sesuai bidang tugas dari Muspika.

Beberapa langkah yang dilakukan untuk pengendalian situasi tramtib dilakukan dengan cara sebagai berikut :

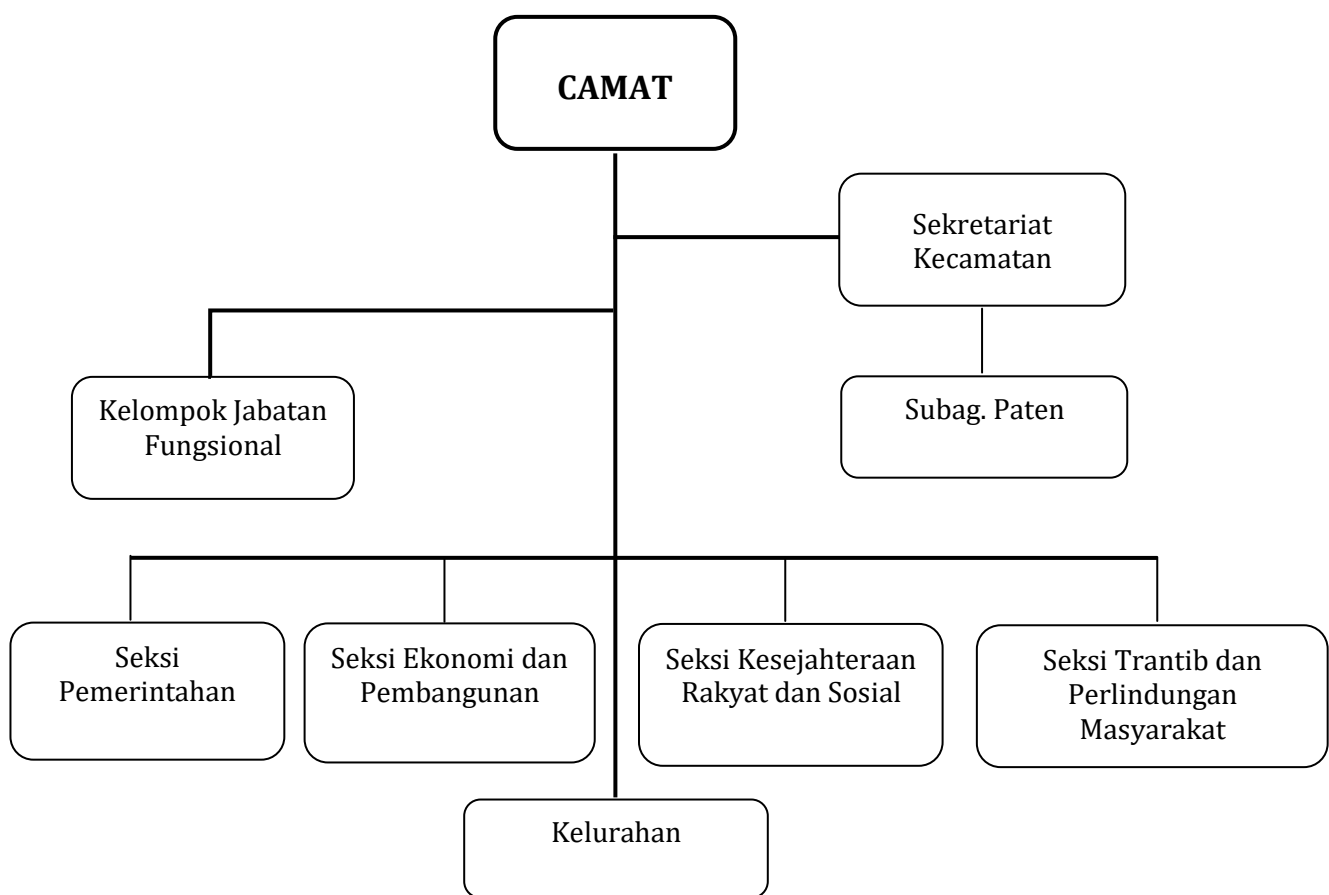
- a. Mengaktifkan lembaga Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat desa dan kecamatan
Forum ini menjadi salah satu kepanjangan tangan dari Muspika dalam pencarian berbagai macam informasi yang berkembang di masyarakat, serta menjadi lembaga untuk menangani berbagai macam persoalan yang muncul di masyarakat;
- b. Pendekatan ke berbagai tokoh agama dan masyarakat
Kegiatan ini dilakukan dengan cara silaturahmi secara khusus kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mengantisipasi

- berkembangnya berbagai isu permasalahan serta menjadi salah satu sarana untuk pendekatan dalam rangka pengamanan situasi wilayah.
- c. Pertemuan dengan tokoh masyarakat dan kelembagaan yang ada
Pertemuan ini bersifat non formal di mana Camat mengundang kehadiran Danramil, Kapolsek, toma, toga, topem dan berbagai aspek dalam masyarakat baik sekedar untuk bersilaturahmi ataupun membahas berbagai macam hal untuk pengembangan wilayah, penanganan permasalahan masyarakat dan lainnya. Upaya ini cukup positif dalam menjamin hubungan komunikasi antar warga dengan pimpinan kecamatan.
 - d. Aktif dalam menghadiri kegiatan di masyarakat
Kalender kegiatan kemasyarakatan bisa dilihat dari adanya kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan dalam bulan tertentu, bisa setahun sekali atau dua tahun sekali. Kegiatan tersebut berupa pengajian dalam rangka PHBI (Mauludan, Muharam, dan lainnya), atau kegiatan lain yang melibatkan seluruh aspek masyarakat. Menjadi penting untuk hadir dan bertemu dengan masyarakat, kesempatan tersebut adalah kesempatan yang paling sederhana untuk menyampaikan berbagai program kegiatan pemerintahan dan juga menyerap keluhan kesah masyarakat serta masukan informasi dari masyarakat.

Jika dilihat dari potensi bencana alam, Kecamatan Watumalang cukup rawan terjadi bencana, tercatat tahun 2020 ada beberapa kejadian bencana alam, diantaranya Tanah longsor. Angin puting beliung, Pohon roboh dan Kebakaran, Sebagian besar disebabkan oleh curah hujan yang intens dan kondisi geografis yang labil. Untuk mengantisipasi hal ini diperlukan kerjasama antar pihak yang terkait (Kecamatan, Polsek, Koramil, pemerintah desa dan masyarakat setempat) untuk tanggap bencana serta kesadaran untuk menjaga lingkungan dan menggunakan lahan sesuai peruntukannya.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Watumalang

Organisasi Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo. Susunan organisasi Perangkat Daerah Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan membawahi Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan 4 Seksi, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial dan Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat. Bagan struktur organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :



Untuk tugas dan fungsi Camat, sebagaimana diamanatkan dalam PP 17 tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk rincian tugas kecamatan telah diatur di dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 85 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Kecamatan Kabupaten Wonosobo.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Watumalang

2.2.1. Kepegawaian

Komposisi Pegawai Kecamatan Watumalang sampai dengan keadaan bulan Desember 2020 sebanyak 24 orang (Kecamatan dan Kelurahan), terdiri dari 19 orang ASN dan 5 orang NON ASN (4 orang di Kecamatan Watumalang dan 1 orang Kelurahan Wonoroto). Adapun jumlah pegawai kantor Kecamatan Watumalang menurut status, pangkat dan golongan per Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.
Jumlah Pegawai menurut Status, Pangkat dan Golongan
(Per 2021)

KECAMATAN WATUMALANG

No	Status Kepegawaian	Gol. Ruang	Unit Kerja Kecamatan Watumalang								
			Camat	Sekretaris Kec.	Kasi Pemerintahan	Kasi Ekbang	Kasi Kesos	Kasi Trantib	Kasubag Paten	Fungsional	Staf
1	Pembina	IV/a	1								
2	Pembina	IV/a		1							
3	Pembina	IV/a				1					
4	Penata Tk. 1	III/d					1				
5	Penata	III/c						1	1		
6	Pengatur Tk 1	II/d									3
7	Pengatur	II/c									2
8	Pengatur Muda Tk1	II/b									1
9	Pengatur Muda	II/a									1
10	Juru	I/c									1
Total			1	1		1	1	1	1		8

KELURAHAN WONOROTO

No	Status Kepegawaian	Gol. Ruang	Unit Kerja Kelurahan Wonoroto				
			Lurah	Sekretaris Lurah	Kasi Pemberdayaan	Fungsional	Staf
1	Penata	III/c	1				
2	Penata Tk. 1	III/d		1	1		
7	Pengatur	II/c					2
8	Pengatur Muda Tk1	II/b					
9	Pengatur Muda	II/a					
10	Juru	I/c					
Total			1	1	1		2

Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan Watumalang dan Kelurahan Wonoroto berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan ASN	Jml ASN	Jml NON ASN
1.	S2	3	-
2.	S1	5	2
3.	D3	3	2
4.	SLTA	5	1
5.	SLTP	3	-

2.2.2. Aset Kantor Kecamatan Watumalang

Aset berupa sarana dan prasarana kecamatan yang dimiliki Luas lahan Kantor Kecamatan yang terbagi menjadi Ruang Perkantoran, Pendopo Kecamatan dan Rumah Dinas Camat.

Data Aset berupa sarana dan prasarana pada Kantor Kecamatan Watumalang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Data Aset Sarana dan Prasarana Kecamatan Watumalang dan Kelurahan Wonoroto Akhir per 2021

KECAMATAN WATUMALANG

No.	Ruangan	Perlengkapan	Jml	Kondisi
1	Ruang Camat	Lemari Kayu	1	Baik
		Meja Pejabat	1	Baik
		Meja Dan Sofa Tamu	1	Baik
		Meja Dan Kursi Tamu	1	Baik
		Kursi Pejabat	1	Baik
		PC	1	Baik
		Printer	1	Baik
		AC Duduk	1	Baik
		Dispenser Hot& cold	1	Baik
2.	Ruang Sekretariat	Meja Pejabat	1	Baik
		Meja Dan Kursi Tamu	2	Baik
		Kursi Kerja Pegawai	6	Baik
		Meja Pegawai	6	Baik
		Almari Sliding	1	Baik
		Lemari Kayu	3	Baik
		PC	2	Baik
		Printer	2	Baik
		Scanner	1	Baik
		Televisi	1	Baik
		Laptop	3	Baik
3.	Ruang Pelayanan	Kursi Kerja Pegawai	6	Baik
		Lemari Rak Arsip	1	Baik

No.	Ruangan	Perlengkapan	Jml	Kondisi
4.	Ruang Seksi	AC	1	Baik
		Kursi Tunggu Pelayanan	4	Baik
		Paket Meja Pelayanan	1	Baik
		Televisi	1	Baik
		Antena Parabola	2	Baik
		Printer	2	Baik
		Meja Kerja Pegawai	4	Baik
		Lemari Kayu	1	Baik
		PC	2	Baik
		Laptop	1	Baik
		Mesin Rekam KTP	1	Baik
		Kamera	1	Baik
		Meja Kursi	1	Baik
		Radio SSB	1	Baik
		Meja dan Kursi Tamu	1	Baik
		Kursi Kerja Pegawai	15	Baik
		Meja Pegawai	13	Baik
		Lemari Kayu	5	Baik
		Lemari Besi	2	Baik
		LCD Proyektor	1	Baik
PC	5	Baik		
Printer	5	Baik		
Scanner	1	Baik		
Laptop	5	Baik		
Kamera	1	Baik		
Kipas Angin	1	Baik		
Dispenser	1	Baik		
5.	Ruang PKK	Meja dan Kursi Tamu	1	Baik
		Kursi Kerja Pegawai	2	Baik
		Lemari Kayu	2	Baik
		Kipas Angin	1	Baik
6.	Ruang Pertemuan	Lemari Kayu	2	Baik
		Lemari Bekdrop	1	Baik
		LCD Proyektor	1	Baik
		Meja Kayu	7	Baik
		Kursi Rapat	100	Baik
		Mimbar	1	Baik
		Sound Sistem	1	Baik
		AC Duduk	1	Baik
7.	Rumah Dinas Camat - Mushola	Sprinbat	1	Baik
		Kursi	5	Baik
		Kipas Angin	1	Baik
		Dispenser	1	Baik
		Meja Kayu	3	Baik
		Lemari Kayu	2	Baik

No.	Ruangan	Perlengkapan	Jml	Kondisi
		Meja Kursi Tamu	3	Baik
		Rak Penyimpan Kitab	2	Baik
		Suci dan Peralatan Sholat	1	Baik
		Karpet	1	Baik
			2	Baik

Sumber : Sekretariat Kecamatan Watumalang

KELURAHAN WONOROTO

No.	Ruangan	Perlengkapan	Jml	Konsidi
1	Ruang Lurah	Lemari Kayu	1	Baik
		Meja Pejabat	1	Baik
		Meja Dan Sofa Tamu	1	Baik
		Meja Dan Kursi Tamu	1	Baik
		Kursi Pejabat	1	Baik
		Laptop	1	Baik
2.	Ruang Sekretariat	Meja Kerja	3	Baik
		Kursi Kerja Pegawai	6	Baik
		Almari Besi	3	Baik
		Lemari Kayu	4	Baik
		PC	3	Baik
		Printer	1	Baik
		Televisi	1	Baik
		Laptop	1	Baik
		Proyektor	1	Baik
		Sundsistem	1	Baik
		Dispenser	1	Baik
3.	Ruang Pelayanan	Kursi Kerja Pegawai	2	Baik
		Lemari Rak Arsip	4	Baik
		Kursi Tunggu Pelayanan	2	Baik
		Paket Meja Pelayanan	1	Baik
		Televisi	1	Baik
		Antena Parabola	1	Baik
		Printer	1	Baik
		Meja Kerja Pegawai	2	Baik
		Lemari Kayu	1	Baik
		PC	1	Baik
		Laptop	1	Baik
4.	Ruang PKK	Meja dan Kursi Tamu	1	Baik
		Kursi Kerja Pegawai	4	Baik
		Meja Pegawai	4	Baik
		Lemari Kayu	1	Baik
5.	Ruang Pertemuan	Meja dan Kursi Tamu	2	Baik
		Kursi Kerja Pegawai	2	Baik
		Kursi	100	Baik

Sumber : Sekretariat Kelurahan Wonoroto

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan publik saat ini terus menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Wonosobo, tak terkecuali bagi Kecamatan yang merupakan pusat pelayanan masyarakat dan sebagai simpul pelayanan untuk kantor/ instansi pelayanan terpadu Kabupaten. Secara umum pelayanan di wilayah Kecamatan Watumalang saat ini masuk kategori Baik, hal ini dibuktikan oleh hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan pada tahun 2019 untuk jenis layanan KTP dan KK. Pengukuran IKM pada Kecamatan Watumalang dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik, terdapat 9 (sembilan) unsur yang dapat diberlakukan untuk semua jenis pelayanan, untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan yaitu:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/ Tarif

Biaya/ Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerimalayanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Pengukuran IKM pada Kantor Kecamatan Watumalang menghasilkan skor 82,00 masuk dalam kategori mutu pelayanan Baik (B), meskipun ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu maklumat pelayanan, persyaratan pelayanan, prosedur dan waktu pelayanan.

Mulai Tahun 2014, tepatnya sejak diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Wonosobo, pelayanan di Kecamatan Watumalang resmi menjadi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang melayani perijinan dan nonperijinan.

Jenis pelayanan perizinan yang dilimpahkan oleh Bupati ke Kecamatan diantaranya: Izin gangguan Ho, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat izin usaha perdagangan (SIUP) untuk kategori usaha perorangan mikro dengan modal kurang dari atau sama dengan Rp 50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk kategori usaha perorangan mikro dengan modal usaha kurang dari atau sama dengan Rp. 200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah), Izin pemasangan reklame untuk kategori pemasangan di atas toko atas halaman / pekarangan dengan ukuran paling luas 6 (enam) meter persegi, Izin salon dan rumah makan kecil, Rekomendasi izin perhelatan, Rekomendasi izin hiburan.

Untuk jenis usaha non perizinan meliputi : pengelolaan administrasi akte kelahiran, Pengelolaan administrasi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pengelolaan administrasi Kartu Keluarga (KK), Surat Pengantar ke Catatan Sipil seperti Surat Pengantar akte kelahiran, Surat keterangan pindah penduduk d dalam wilayah daerah, Surat keterangan miskin, Pengantar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), Pengantar rekomendasi survey penelitian, Pengantar izin keramaian, Pengantar rekomendasi nikah, talak, cerai, rujuk (NTPCR), pengantar pendirian kelompok usaha, koperasi, kesenian/ sanggar seni dan badan hukum lainnya, Surat keterangan waris, Dispensasi nikah, Surat keterangan dan rekomendasi lain yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pencapaian kinerja Kecamatan Watumalang dapat dilihat dalam Tabel 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watumalang

Tabel 3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watumalang
Kabupaten Wonosobo

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	82,5	-	66,5	73	80,8	82,3	80,6	73,03	78,28	83,9	83,05	81,8	94,8%	100%	106%	104%	99%
2	Nilai Evaluasi SAKIP	-	67,5	-	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,7	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: LKjIP Kecamatan Watumalang Tahun 2016 – 2020 (data diolah)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Watumalang Tahun 2020 ditargetkan sebesar 82,5 dan tercapai 81,8 atau realisasi target sebesar 99%. Adapun nilai IKM sesuai target akhir Renstra Kecamatan Watumalang Tahun 2021-2026 adalah 82. Meskipun target akhir Renstra Kecamatan Watumalang tidak tercapai 100%, dengan nilai IKM sebesar 81,8 maka mutu pelayanan di Kecamatan Watumalang masuk kategori “Baik”. Nilai IKM Kecamatan Watumalang Tahun 2020 82,4.

Nilai evaluasi SAKIP Kecamatan Watumalang Tahun 2020 ditargetkan sebesar 67,5 dan tercapai 67,77 atau realisasi target sebesar 100%. Adapun nilai evaluasi SAKIP Kecamatan Watumalang sesuai target akhir Renstra Kecamatan Watumalang Tahun 2021-2026 adalah 67,5. Dengan demikian, maka target akhir Renstra Kecamatan Watumalang pada indikator ini tercapai 100%.

Salah satu penunjang keberhasilan ini karena Camat Watumalang mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara seluruh pegawai Kecamatan Watumalang sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan setiap program/kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Watumalang ditunjang dengan pendanaan sebagaimana termuat pada Tabel 4, sebagai berikut :

Tabel 4.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Watumalang dan Kelurahan Wonoroto
 Kabupaten Wonosobo

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
KEC. WATUMALANG		2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020		
BELANJA			9.406.647.828	3.992.172.064	3.295.656.010		8.680.813.307	8.975.110.001	3.653.022.361	2.967.066.385			95.41	91.50	90.03		
BELANJA OPERASI			3.998.397.828	3.992.172.064	2.989.846.010		3.157.357.907	3.613.935.001	3.357.145.361	2.670.118.885			90.38	90.93	89.31		
Belanja Pegawai			2.590.850.828	2.558.838.814	2.396.197.760		2.304.596.116	2.238.490.415	2.288.362.560	2.113.635.715			86.40	89.43	88.21		
Belanja Barang			1.037.297.000	921.133.250	593.648.250		516.246.791	1.007.420.586	862.643.301	556.483.170			97.12	93.65	93.74		
Belanja Hibah			365.750.000	200.000.000	0.00		336.515.000	363.524.000	193.939.500	0.00			99.39	96.97	0.00		
Belanja Bantuan Sosial			4.500.000	12.200.000	0.00		0.00	4.500.000	12.200.000	0.00			100	100	0.00		
BELANJA MODAL			5.408.250.000	300.000.000	305.810.000		5.523.455.400	5.361.175.000	295.877.000	296.947.500			99.13	98.63	97.10		
Belanja Peralatan dan Mesin			14.000.000	100.000.000	220.810.000		173.904.000	13.800.000	98.610.000	213.821.500			98.57	98.61	96.84		
Belanja Bangunan dan Gedung			604.250.000	0.00	85.000.000		402.558.000	600.706.000	0.00	83.126.000			99.41	0.00	97.80		
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			4.790.000.000	200.000.000	0.00		4.946.993.400	4.746.669.000	197.267.000	0.00			99.10	98.63	0.00		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
KEL. WONOROTO		2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020		
PENDAPATAN			47.200.000	42.000.000	56.500.000		47.975.000	15.000.000	117.000.000	58.000.000			31.78	278.57	102.65		
PENDAPATAN ASLI DAERAH			47.200.000	42.000.000	56.500.000		47.975.000	15.000.000	117.000.000	58.000.000			31.78	278.57	102.65		
Pendapatan Retribusi Daerah			0.00	0.00	-		47.975.000	15.000.000	0.00	-			0.00	0.00	102.65		
Lain-lain PAD yang Sah			47.200.000	42.000.000	56.500.000		0.00	0.00	117.000.000	58.000.000			0.00	27.57	94.50		
BELANJA			427.493.000	1.851.261.500	1.982.123.500		431.322.250	402.779.063	1.793.612.866	1.873.040.163			94.22	96.89	90.82		
BELANJA OPERASI			377.493.000	526.261.500	930.573.500		367.334.000	353.471.063	516.496.866	845.185.163			93.64	98.14	66.22		
Belanja Pegawai			23.500.000	31.000.000	22.200.000		15.000.000	23.500.000	23.750.000	14.700.000			100	76.61	88.06		
Belanja Barang			353.993.000	495.261.500	652.323.500		352.334.000	329.971.063	492.746.866	574.435.163			93.21	99.49	100		
Belanja Bantuan Sosial			-	-	256.050.000		-	-	-	256.050.000			-	-	-		
BELANJA MODAL			50.000.000	1.325.000.000	1.051.550.000		63.988.250	49.308.000	1.277.116.000	1.027.855.000			98.62	96.39	97.75		
Belanja Peralatan dan Mesin			0.00	40.000.000	43.900.000		14.800.000	0.00	29.476.000	41.265.000			0.00	73.69	94.00		
Belanja Bangunan dan Gedung			50.000.000	494.850.000	567.621.850		0.00	49.308.000	485.944.000	553.336.850			98.62	98.20	97.48		
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			0.00	790.150.000	424.428.150		49.188.250	0.00	761.696.000	418.553.150			0.00	96.40	98.62		
Belanja Aset Tetap Lainnya			-	-	15.600.000		-	-	-	14.700.000			-	-	94.23		

Sumber: SIMDA Kabupaten Wonosobo (data diolah)

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Watumalang

Permasalahan atau faktor yang menghambat aktivitas yang terjadi selama memberikan pelayanan publik, baik dari sisi pelanggan/ masyarakat ataupun petugas pemberi pelayanan adalah :

1. Ada sebagian warga yang belum melaksanakan rekam e-ktp, hal ini mengakibatkan data yang bersangkutan tidak muncul di database kecamatan sehingga yang bersangkutan harus rekam ke kantor Capil.
2. Masalah jaringan internet, koneksitas dengan SIAK lambat bahkan sering trouble
3. Banyak warga yang belum memahami prosedur pelayanan di kecamatan ataupun di desa (runtutannya)
4. Penjabaran untuk pelayanan prima juga diikuti oleh sarana dan prasarana yang mendukung dan pembiayaan secara khusus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

Rencana program dan solusi untuk meningkatkan pelayanan publik diantaranya :

1. Penyederhanaan persyaratan dan prosedur pelayanan
2. Peningkatan SDM petugas pelayanan melalui pelatihan-pelatihan
3. Diperlukan sistem pengaduan yang lebih jelas agar masyarakat merasa nyaman dan aman dalam menyampaikan keluhan, kritik maupun saran dengan mengoptimalkan kotak saran.
4. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur pelayanan yang tepat.
5. Survei Kepuasan Masyarakat perlu terus dilakukan secara teratur agar capaian kepuasan masyarakat dapat terus dipantau untuk dievaluasi agar pelayanan prima kecamatan dapat tercapai.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Kecamatan Watumalang menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu adanya kerjasama yang baik. Tetapi ada beberapa permasalahan yang dihadapi di Kecamatan Watumalang seperti dapat diidentifikasi sebagaimana termuat pada Tabel 5, sebagai berikut:

Tabel 5.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

No.	Isu Strategis	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah	Data Dukung
1	Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1. Kuantitas dan kualitas SDM pelayanan belum memadai	1. Jumlah SDM Pelayanan tidak sesuai Formasi	1. Tidak ada rekrutmen ASN Bidang Pelayanan di Kecamatan 2. Banyak ASN pelayanan yang pensiun/mutasi	
			2. Kapasitas SDM Pelayanan tidak sesuai dengan Standar Jabatan	1. Kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan jabatan 2. SDM pelayanan belum memiliki kompetensi teknis pelayanan	
		2. Minimnya dukungan dari Perangkat Daerah kepada Kecamatan	1. Belum optimalnya dukungan Sarpras Pelayanan Administrasi Kependudukan	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan oleh Perangkat Daerah Teknis pengampu Urusan Administrasi Kependudukan	
			2. Kurangnya monitoring dan evaluasi dari Perangkat Daerah	1. Monitoring tidak dilakukan secara berkala 2. Minimnya Operasi Penegakan Perda	
		3. Kurang efektif akses pelayanan ke masyarakat	1. Kurang efektifnya sosialisasi kepada masyarakat	Media sosialisasi kurang komunikatif	
			2. Belum optimalnya peran petugas register desa/ kelurahan	Kurangnya pembinaan bagi petugas register desa/ kelurahan	
			3. Belum tersedianya fasilitas pelayanan kepada kelompok rentan		
		4. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat	1. Data sasaran belum tepat	Proses update sasaran belum optimal	
			2. Masih belum optimalnya koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan	Ego sektoral	
			3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat	Masih minimnya saluran partisipasi masyarakat	
		5. Masih adanya konflik dan permasalahan	1. Belum optimalnya peran lembaga masyarakat		

No.	Isu Strategis	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah	Data Dukung
		yang terjadi di masyarakat	desa/ keluarahn dalam fasilitasi terciptanya Toleransi dan kerukunan		
			2. Belum optimalnya koordinasi keamanan, ketertiban umum		
		6. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa	1. Distribusi pekerjaan perangkat desa belum sesuai dengan tupoksinya	Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman perangkat desa	
			2. Belum optimalnya pengawasan administrasi di tingkat desa	Fungsi pengawasan BPD masih minim	

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

VISI MISI

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Wonosobo Yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera”, yang akan diwujudkan melalui 5 (empat) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
2. Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi.
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern.
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata.
Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.

Memperhatikan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2021-2026 dan juga memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo, maka tugas dan fungsi Kecamatan akan mempengaruhi pencapaian

Misi 1: “Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi,

peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.”

Faktor-faktor penghambat pelayanan Kecamatan Watumalang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Sumber Daya Manusia Kecamatan yang secara kualitas dan kuantitas masih kurang memadai.
2. Anggaran Kecamatan yang sangat terbatas.
3. Teknologi informasi belum dimanfaatkan secara optimal oleh para pegawai Kecamatan karena keterbatasan pengetahuan.

Adapun faktor-faktor pendorong pelayanan Kecamatan Watumalang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2022-2026, yaitu :

1. Adanya kejelasan mengenai tugas dan fungsi Kecamatan.
2. Adanya standar operasional dan prosedur pelayanan yang baku.
3. Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang cukup memadai.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan Renstra Kecamatan karena sudah dipandang cukup mengacu pada RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Watumalang ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS :

1. Belum adanya kejelasan mengenai batasan kewenangan Kecamatan dalam rangka pengembangan wilayah.
2. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial dan ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.
3. Pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum berakhir sangat menghambat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
4. Lokasi Kecamatan Watumalang jauh dari jangkauan ibu kota dan merupakan jalur non strategis/non akses wisata sehingga termasuk wilayah yang susah untuk berkembang.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Watumalang

Selaras dengan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Watumalang Tahun 2021-2026 sebagaimana termuat dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 6.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan
Watumalang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Menguatkan transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Meningkatnya nilai SKM	IKM (Permenpan 14/17)	82,5%	83%	83,5%	84%	84,5%
3	Peningkatan cakupan sasaran program bantuan sosial	Meningkatnya kualitas keluarga	Rata-rata usia perkawinan pertama perempuan	18,2 th	18,4 th	18,6 th	18,8 th	19 th
		Meningkatnya kualitas data sasaran program bantuan sosial	desa yang melakukan verval data secara kontinyu	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatkan partisipasi publik dalam politik	Meningkatkan partisipasi penggunaan hak pilih dalam pemilu	Angka Partisipasi Politik dalam Pileg, Pilpres, Pilkada	92,5%	95%	97%	98%	100%
5	Meningkatkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya dukungan sosial kepada kelompok rentan	kenaikan dana sosial keagamaan	1	1	1	1	1
		Meningkatnya kondusifitas wilayah	pelanggaran tramtibum yang dilaporkan	100%	100%	100%	100%	100%
6	Meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan keamanan	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Presentase penyelesaian konflik sosial	100%	100%	100%	100%	100%
7	Meningkatkan lapangan kerja	Meningkatnya jumlah desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa	desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa	100%	100%	100%	100%	100%
8	Meningkatkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di wilayah kecamatan	Menurunnya angka putus sekolah	Rasio anak putus sekolah pendidikan dasar yang tertangani	10%	15%	120%	25%	130%
9	Menurunkan angka stunting di wilayah kecamatan	Meningkatkan kualitas gizi keluarga	balita stunting yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%
10	Peningkatan status IDM	Meningkatnya kontribusi komponen ekonomi dalam IDM	Indeks ketahanan ekonomi IDM	0,60%	0,62%	0,64%	0,66%	0,68%
11	Meningkatkan layanan akses air limbah domestik layak	Meningkatnya cakupan sanitasi	kenaikan cakupan rumah tangga sanitasi dasar	8,3%	16,6%	24,9%	24,9%	24,9%
12	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni	Meningkatnya penanganan RTLH	kenaikan RTLH tertangani	29,4%	37,3%	45,3%	53,2%	61,2%
13	Mengembangkan kategori desa wisata	Meningkatnya alokasi anggaran dana desa untuk pengembangan desa wisata	Rasio dana pengembangan desa wisata bersumber APB Desa	5%	5%	5%	5%	5%
14	Meningkatkan pertumbuhan UMKM, koperasi dan lembaga ekonomi desa	Meningkatnya Koperasi yang terfasilitasi perangkat daerah yang membidangi koperasi untuk usaha yang sehat	Koperasi terdaftar terfasilitasi	30%	35%	40%	45%	50%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
15	Meningkatkan pengelolaan sampah	Meningkatnya jumlah lembaga pengelola sampah 3R	kenaikan desa / kelurahan yang memiliki lembaga pengelola sampah 3R yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%
16	Meningkatkan ketahanan daerah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	kenaikan desa/kelurahan yang memiliki relawan penanggulangan bencana	4,15%	4,91%	5,66%	6,42%	7,55%
17	Mewujudkan perangkat daerah yang akuntabel	Meningkatnya bobot (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja) disesuaikan kondisi kec	Nilai SAKIP	65,76	66,42	68,64	70,64	72,47

Selanjutnya Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kecamatan Watumalang Tahun 2021-2026 sebagaimana termuat dalam Tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Wonosobo Yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera			
MISI I : Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menguatkan transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	<ol style="list-style-type: none"> Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui layanan jemput bola ke Desa/ Kelurahan Mempermudah pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan aplikasi <i>whatsapp</i> Meningkatkan kapasitas petugas pelayanan Meningkatkan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Melaksanakan pendampingan RKP Desa Melaksanakan pendampingan APB Desa Melaksanakan pendampingan Aset Desa 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kondusivitas Wilayah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kondusivitas Wilayah
Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Meningkatnya UMKM yang terfasilitasi Perangkat Daerah yang membidangi UMKM untuk menaikkan kelas		
Peningkatan cakupan sasaran program bantuan sosial	Meningkatnya kualitas data sasaran program bantuan sosial		
Meningkatkan Partisipasi Publik Dalam Politik	Meningkatkan partisipasi penggunaan hak pilih dalam pemilu		
Meningkatkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya dukungan sosial kepada kelompok rentan		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan keamanan	Meningkatnya kondusifitas wilayah	8. Melaksanakan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan rintisan secara berkelanjutan	
Meningkatkan lapangan kerja	Meningkatnya jumlah desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa		
Meningkatkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di wilayah Kecamatan	Menurunnya angka putus sekolah		
Menurunkan angka stunting di wilayah kecamatan	Meningkatkan kualitas gizi keluarga		
Peningkatan status IDM	Meningkatnya kontribusi komponen ekonomi dalam IDM		
Meningkatkan layanan akses air limbah domestik layak	Meningkatnya cakupan sanitasi		
Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni	Meningkatnya penanganan RTLH		
Mengembangkan kategori desa wisata	Meningkatnya alokasi anggaran dana desa untuk pengembangan desa wisata		
Meningkatkan pertumbuhan UMKM, Koperasi dan Lembaga Ekonomi Desa	Meningkatnya Koperasi yang terfasilitasi perangkat daerah yang membidangi koperasi untuk usaha yang sehat		
Meningkatkan pengelolaan sampah	Meningkatnya jumlah lembaga pengelola sampah 3R		
Meningkatkan ketahanan daerah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana		
Mewujudkan perangkat daerah yang akuntabel	Meningkatnya bobot (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja) disesuaikan kondisi kecamatan		

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Renstra Kecamatan Watumalang dan Kelurahan Wonoroto Tahun 2021-2026 sebagaimana pada Tabel 8. di bawah ini :

Tabel 8.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Watumalang
dan Kelurahan Wonoroto Kabupaten Wonosobo

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, Kecamatan Watumalang menetapkan indicator-indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, indikator kinerja Kecamatan Watumalang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 sebagaimana termuat dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 9.
Indikator Kinerja Kecamatan Watumalang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Nilai informasi yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kenaikan jumlah informasi wajib yang tersedia	-	100%	100%	-	-	-	-
4	dokumen non perizinan yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Rata-rata usia perkawinan pertama perempuan	18 th	18,2 th	18,4 th	18,6 th	18,8 th	19 th	19 th
6	dokumen non perizinan yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	desa yang melakukan verval data secara kontinyu	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	kenaikan desa yang melakukan verval data secara kontinyu	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	desa dan kelurahan dengan skala prioritas usulan 3 aspek (ekonomi, sosial dan infrastruktur) secara proporsional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	desa dan kelurahan yang melakukan verval per semester	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	pelanggaran pilkades yang terselesaikan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Penurunan angka pelanggaran pilkades	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	kenaikan dana sosial keagamaan	-	1	1	1	1	1	1
14	ZIS Kecamatan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	kenaikan ZIS	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	pelanggaran tramtibum yang dilaporkan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	penurunan perkelahian antar kelompok/desa/kelurahan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	konflik antar kelompok/desa/kelurahan yang terselesaikan	-	100%	100%	-	-	-	-

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
19	desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	kenaikan desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	kenaikan desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa	-	5%	5%	5%	5%	5%	5%
22	desa yang mengalokasikan anggaran untuk penanganan angka putus sekolah pendidikan dasar	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23	kenaikan desa yang mengalokasikan anggaran untuk beasiswa untuk masyarakat miskin dalam APBDes	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	Prevalensi stunting di kecamatan	10,74%	9,99%	9,24%	8,49%	7,74%	7%	7%
25	balita stunting yang tertangani	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	desa yang mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas gizi ibu hamil dan balita	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	kenaikan desa yang mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas gizi ibu hamil dan balita	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk peningkatan ekonomi desa	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29	kenaikan desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk sanitasi layak	-	100%	-	-	-	-	-
30	desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk sanitasi layak	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
31	peningkatan desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk RTLH	-	100%	-	-	-	-	-
32	desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk RTLH	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	kelompok sadar wisata (Pokdarwis) aktif	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	kenaikan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) aktif	-	5%	5%	5%	5%	5%	5%
35	kenaikan BUMDes rintisan menjadi BUMDes dengan status berkembang	-	10%	10%	10%	10%	10%	10%
36	desa dengan alokasi anggaran untuk BUMdes meningkat	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
37	desa/kelurahan yang sudah menerapkan pengelolaan sampah 3R	-	8,301887	8,679245	9,433962	10,18868	13,20755	13,96226
38	desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk pengelolaan sampah	-	100%	100%	100%	100%	-	-
39	desa/kelurahan yang memiliki relawan penanggulangan bencana	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40	desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk penanggulangan bencana	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
41	Nilai SAKIP	64,5	65,76	66,42	68,64	70,64	72,47	72,47


BAB VII PENUTUP

Rencana Strategi Kecamatan Watumalang Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan melibatkan segenap *stakeholder*. Dalam penyusunannya, kami telah berupaya semaksimal mungkin agar tujuan, sasaran dan program kegiatan Kecamatan Watumalang selama lima tahun ke depan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026.

Renstra kecamatan dalam tiap tahunnya dijabarkan dalam rencana kerja sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Wonosobo. Untuk tercapainya kondisi yang diharapkan pada tahun 2026, maka peran serta masyarakat dan seluruh stake holder mutlak diperlukan dalam kerangka pembangunan Kecamatan Watumalang yang merupakan bagian dari pembangunan Kabupaten Wonosobo.

Semoga penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Watumalang Tahun 2021-2026 dapat terwujud sesuai harapan masyarakat serta senantiasa Allah SWT meridhoi setiap langkah yang kita laksanakan.

Watumalang, Desember 2021



CAMAT WATUMALANG

AMIR MA'RUF, S.E
Pembina
NIP. 19670323 198608 1 001

**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN WATUMALANG**

Jalan Kyai Jebeng Lintang Nomor 29 Wonoroto Telepon (0286) 3304957
Website : kecamatanwatumalang.wonosobokab.go.id
Email : watumalang08@gmail.com
WATUMALANG - 56352